

Mempertanyakan Identitas Ke-Indonesia-an

Hudan Irsyadi AR

Program Studi Antropologi Sosial Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun
Anggota JIKTI
Asosiasi Tradisi Lisan Maluku Utara
email: oddoalmamluk@gmail.com - HP. 082188040461

Abstract

This article discussing the complexity of the Indonesian people who are least destabilize diversity. The concept of a "bhinneka tunggal ika" which means "different but still one" predicted as an adhesive in the plurality of the Indonesian nation. In this article the author uses a communicative approach to the action of Jurgen Habermas to offer a solution to the use of the concept of pluralism and multiculturalism in Indonesia.

Keywords: *Indonesian identity, diversity, pluralism, multiculturalism.*

Abstrak

Artikel ini memperbincangkan kompleksitas bangsa Indonesia yang sedikitnya telah menggoyah kebinekaan. Konsep *bhinneka tunggal ika* yang diartikan "berbeda-beda namun tetap satu" digadang-gadang sebagai perekat bangsa Indonesia dalam kemajemukan. Dalam artikel ini penulis menggunakan pendekatan komunikatif tindakan dari Jurgen Habermas untuk menawarkan sebuah solusi pada pemakaian konsep pluralisme maupun multikulturalisme di Indonesia.

Kata kunci: *identitas keindonesiaan, kebinekaan, pluralisme, dan multikulturalisme.*

Pengantar

Hiruk-pikuk persoalan bangsa Indonesia akhir-akhir ini membuat masyarakat menjadi semakin pesimis dan apatis dalam berkehidupan sosial. Berbagai gejala sosial – ekonomi, politik dan budaya – yang ditampilkan oleh media massa (televisi & surat kabar),

seakan mengantarkan bangsa ini pada suatu permainan sandiwara yang tak berujung. Sebuah contoh, dramaturgi antara Ahok *versus* Habib Rizieq. Polemik kedua tokoh yang datang dari latar belakang berbeda (ras dan sukubangsa) tetapi berwarga Indonesia ini, sedikitnya telah mengikis keindonesian kita.

Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan berikut, di manakah identitas ke-Indonesia-an kita? Apakah hanya sebatas menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghafal Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945? Ataukah cukup dengan menyanyikan lagu dari ‘Sabang Sampai Merauke’ sudah merepresentasikan kita sebagai ke-Indonesia-an. Ataukah lagu Padamu Negeri yang sempat diinterpretasikan oleh sastrawan Taufik Ismail yang bermakna sesat,¹ untuk menyatakan kita sebagai bangsa yang berdaulat. Sekiranya, pertanyaan-pertanyaan ini sudah “terecoki” sejak lama di dalam benak kita masyarakat Indonesia sewaktu mengenal dan mengenyam pendidikan dasar (9 tahun).

Dalam skala *nation*, Indonesia adalah sebuah negara besar yang di dalamnya terbentang ribuan pulau-pulau baik pulau-pulau yang besar maupun yang kecil. Terdapat sebuah penegasan dari setiap pemimpin bangsa yang seringkali menyebutkan luas wilayah Indonesia dengan menyatakan bentangan pulau di ujung barat Indonesia (Sabang) sampai dengan ujung timur Indonesia (Merauke). Hal inilah yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan memiliki jumlah pulau sebanyak 13.466.² Secara geografis Indonesia berada pada

6°10.5’LU 106°49.7’BT dan 6,175°LS 106,8283°BT, dengan luas wilayah (total) 1.904.569 km². luas wilayah ini, kemudian didukung dengan jumlah penduduk sebanyak 258 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016.

Nama lain dari Indonesia biasa dipakai adalah Nusantara, yang dalam sejarah pembentukan namanya mempunyai pemaknaan ke dalam bahasa melayu sebagai nusa (pulau) di antara dua benua dan dua samudera. Istilah Nusantara ini kemudian luluh dengan hadirnya semboyan negara *Bhinneka Tunggal Ika* yang menegaskan nama Indonesia sebagai sebuah wilayah yang dihuni oleh ras melayu.³ Selanjutnya, nama Indonesia semakin populer ketika seorang dokter dan etnologi Jerman bernama Adolf Bastian menerbitkan laporan perjalanan dan penelitian dengan judul dalam bahasa Jerman *Indonesien, oder die Insein des Malaysischen Archipels* yang artinya Indonesia, atau Kepulauan Malaya.⁴

³ Nama Indonesia ini dipakai ketika pada tahun 1850 James Richardson Logan menulis artikel di *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia Vol. 4*, dengan judul *The Ethnology of the Indian Archipelago*. Dalam artikelnya itu, terdapat dua pilihan nama yaitu Indonesia atau Malayunesia. Dan dari dua pilihan tersebut, Logan lebih memilih nama Indonesia yang kemudian perubahan huruf U menjadi huruf O, dan dituliskan menjadi Indonesia.

⁴ Lihat Adolf Bastian dalam Karya 5 jilid (1864-1894). *Indonesien, Order des Malaysischen Archipels*. jilid I berjudul Maluku, jilid II Timor dan pulau-pulau sekitarnya, jilid III

¹ Periksa harian Tempo tanggal 29 Januari 2017.

² Periksa www.bakosurtanal.go.id diakses tanggal 17 februari 2017.

Dari karya Bastian inilah hingga akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928 nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa pada rapat Pemoeda-Pemoedi Indonesia yang terkenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda.

Lahirnya Sumpah Pemuda yang dimaknai dalam konteks kesatuan, yakni tanah air satu, bangsa satu, dan berbahasa satu, seakan memberikan pesan pada masyarakat Indonesia secara luas – dari Sabang sampai Merauke – untuk merawat sebuah keberagaman. Disadari, lahirnya Sumpah Pemuda yang mempertautkan dengan konsep *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda namun tetap satu) tidak terlepas dari peran tokoh muda Indonesia yang datang dari berbagai daerah (suku) di Indonesia yang terhimpun dalam Perhimpunan Para Pelajar Indonesia (PPPI). Nama-nama seperti Mohammad Yamin, W.R Supratman, Soegondo Djojopoespito, Soenario Sastrowardjo dan Sie Kok Liong merupakan tokoh sentral lahirnya Sumpah Pemuda ini, dan tidak banyak yang tahu cita-cita Sumpah Pemuda yang digagas oleh mereka.

Banyaknya suku bangsa yang terdapat di Indonesia telah meretaskan alam berpikir mereka untuk mengikrarkan sebuah kebersamaan dalam organisasi kepemudaan sebagai wujud dari keberagaman bangsa Indonesia. Kurang lebih sekitar 3000 suku

bangsa yang terdapat di Indonesia, yang mana masing-masing dari mereka mempunyai identitas kebudayaan sendiri (Liliweri, 2009: 6).

Di samping identitas budaya, terdapat juga berbagai bahasa dan agama yang turut serta dalam negara Indonesia. Sedikitnya terdapat enam agama di Indonesia (Islam, Hindu, Budha, Katholik, Protestan dan Konghucu) dan 721 bahasa yang membaaur satu sama lain dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Secara singkat, semboyan ini dipakai atas dasar historis keberagaman agama sejak zaman kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk.⁵

Uraian dalam tulisan ini didasarkan pada suatu pengamatan empiris atas berbagai fenomena sosial masyarakat Indonesia, yang sedikitnya telah menggerogoti nilai-nilai keberagaman dan kemajemukan, yang telah lama hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebinekaan atau Ketunggalan?

Ketika Sumpah Pemuda dicetuskan oleh para *finding fathers* bangsa ini, maka kita sebagai sebuah identitas telah menjawab

⁵ Istilah *Bhinneka Tunggal Ika* termuat secara jelas pertama kali dalam kitab *Sutasoma*. Karya Empu Tantular, seorang pujangga Majapahit terkenal yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Pada waktu itu, istilah ini melambangkan keanekaragaman pendeta dalam agama Budha dan Hindu yang hidup rukun (Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 3, 1989 : 345).

Sumatera dan sekitarnya, jilid IV Kalimantan dan Sulawesi, jilid V Papua dan penutup.

tentang jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika* yang termanifestasikan ke dalam Sumpah Pemuda; tanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, sejenak telah meluluhkan ke-egosentris-an kita sebagai yang tunggal dalam bernegara.

Kebinekaan yang diartikan sebagai keberagaman (beraneka ragam) merupakan keterampilan kita atas kemajemukan yang terdapat dalam – masyarakat – negara Indonesia. Lambang negara, Pancasila, telah menegaskan makna kebinekaan yang diurai ke dalam lima butir sebagai bentuk dari pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam bernegara. Lambang negara ini selalu mengingatkan kita sebagai bangsa yang beragam; dan lambang ini pula yang selalu tertata dengan baik di kantor-kantor pemerintahan negara Indonesia dan di setiap tempat pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi).

Istilah kebinekaan atau keberagaman sering pula dianalogikan dengan kata kemajemukan. Hal tersebut tidak lain sebagai jawaban atas banyaknya suku bangsa di Indonesia yang hidup berdampingan dalam berinteraksi baik secara sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Meskipun secara kasat mata kebinekaan kita merupakan suatu pemaknaan yang baik dalam praktik berkehidupan sosial. Akan tetapi, tidak sedikit dari kita yang menggoyahkan kebinekaan itu

dalam praktik bermasyarakat dan bernegara. Hal yang paling mendasar ketika bentuk-bentuk kepentingan (ekonomi/politik) dan kekerasan tidak dapat diminimalisir dengan baik dalam suatu kehidupan sosial. Jika hal ini sering berlaku dan terjadi terus-menerus, dapat dikata kita sebagai bangsa Indonesia telah gagal dalam membangun kebinekaan kita.

Pancasila sebagai ideologi negara dengan moto *Bhinneka Tunggal Ika* menyadari betul keberagaman dalam perbedaan. Akan tetapi, maksud baik dari pancasila sering pula kita sebagai warga negara salah dalam penafsiran. Berbagai macam konflik sosial, budaya maupun politik kerap terjadi pada masyarakat Indonesia itu sendiri. Aksi-aksi anarkisme bak jamur yang tumbuh di musim penghujan. Kasus-kasus kekerasan yang ditampilkan media masa (tv dan surat kabar), bagaikan iklan dalam setiap episode film. Indonesia hari ini tentunya lebih baik dari Indonesia tempo dulu dari segi pembangunannya. Namun, sudahkan Indonesia hari ini merawat kemajemukan yang dicita-citakan Indonesia tempo dulu? Sejatinya, negara Indonesia adalah negara yang ber-*bhinneka tunggal ika* yang merangkul perbedaan di dalamnya. Salah satu pertanyaan paling penting bagi kita di Indonesia yaitu bagaimana kita memahami satu sama lain dalam perbedaan. Pertanyaan mendasar ini terkadang kita sulit untuk menjawab.

Dalam konteks kebinekaan, terkadang kita sebagai bangsa Indonesia mempraktikkan ketunggalan kita. Semisal dalam kontestasi politik, di mana ketunggalan kita terlihat pada dominasi-dominasi kelompok yang menjurus pada sebuah identitas. Keberpihakan dan ketaatan pun tanpa sadar sering dipraktikkan pada ranah yang satu ini. Meskipun dalam politik, “kepentingan” adalah segala-galanya, namun tidak melulu praktik dominasi etnis atau golongan tertentu dapat berkuasa. Sebuah tawaran untuk mereposisi kita sebagai bangsa yang beragam adalah ketika Pancasila bukan hanya “dinyanyikan” tetapi diimplementasikan. Begitu juga dengan *Bhinneka Tunggal Ika*, jangan hanya dijadikan moto tanpa dilekatkan pada sebuah hubungan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu, tindakan komunikatif dari Jurgen Habermas (*theory of communicative action*) dinegasikan ke dalam fungsi kemajemukan bangsa Indonesia sebagai bentuk memahami perbedaan yang ada. Sejatinnya, Habermas mencoba untuk membuka harapan dengan menyatakan bahwa perbedaan kita dapat dijabatani oleh bahasa dan akal budi (2008 : 9).

“Beda Warna, Beda Rupa”

Dalam perbincangan saat ini berbagai konflik sosial terjadi karena dipengaruhi oleh SARA dan persaingan politik. Sebagai negara yang memiliki ciri khas

kemajemukan, hal ini menjadi sebuah ironi di mana simbol kebinekaan seolah hanya menjadi “label” yang terpajang begitu saja. Banyak pakar berpendapat bahwa “wajah” Indonesia hari ini sudah terkontaminasi oleh sejumlah konflik sosial yang didasari oleh kepentingan vertikal penguasa.

Masih sangat segar di ingatan kita tentang unjuk rasa “212” di mana sekelompok orang dengan warna “putih” mewarnai kota Jakarta dengan menyuarakan pembelaan “keislaman” mereka terhadap penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sebuah isu SARA yang sarat dengan sebuah pengakuan “keimanan” terhadap salah satu agama mayoritas di tengah keberagaman beragama. Sejatinnya, perbedaan suku, agama dan ras bukan menjadi penghalang untuk menciptakan suatu kehidupan persaudaraan yang rukun.

Selain itu konflik lainnya yang tengah bergejolak yakni lahir dari warna politik kita yang ditunggangi oleh rasa persatuan dan saling berebut menjadi “Indonesia” yang sebenarnya. Kita tahu bahwa di negara kita ini begitu banyak kelompok partai politik yang membawa warna mereka masing-masing. Bagaimana warna “merah” bertemu dengan “hijau”, “putih” dan “biru”, bahkan akhir-akhir ini sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada) yang ada tidak lagi diwarnai oleh warna dasar partai mereka melainkan warna “simbol”. Warna

“merah” dengan rupanya yang mengedepankan “blusukan” untuk lebih dekat dengan masyarakat, “hijau”, “putih” rupanya yang serupa tapi tak sama yakni menonjolkan sisi agama sebagai dasar pemikiran dan acuan dalam memimpin. Berbeda dengan “biru” yang mengedepankan demokrasi secara terang benderang dalam asas kepemimpinannya.

Contoh nyata penyebaran warna-warna tersebut yaitu pilkada DKI Jakarta. Pilkada DKI Jakarta adalah seperti “miniatur” dari pemilihan umum Presiden, karena DKI Jakarta dianggap kota yang paling besar dan menjadi daya tarik tersendiri serta memiliki penduduk yang multikultur, terbanyak dari provinsi yang lain. Konflik politik di DKI Jakarta yang terus-menerus diberitakan di semua siaran televisi nasional menjadi “tontonan” menarik di setiap waktu.

“Kotak-kotak merah” yang dipertemukan dengan “hitam” dan “putih” sepanjang satu bulan terakhir mewarnai Jakarta dengan visi misi masing-masing kandidat untuk mengubah Jakarta. Banyak di antara kita yang saling beradu pendapat. Bahkan, tidak jarang terjadi “*black campaign*” kampanye hitam, untuk menjatuhkan lawan. Dan disitulah INDONESIA seolah ditarik untuk meng-iyakan semua hal yang dijanjikan tanpa adanya realisasi yang jelas.

Dari asumsi tersebut terlihat jelas bahwa bagaimana rupa Indonesia bergantung pada warna apa yang berkuasa.

Antara Pluralisme dan Multikulturalisme

Melihat “wajah” Indonesia bagaikan melihat pelangi yang terbentang indah di langit. Penuh warna dengan karakteristik yang tidak dimiliki oleh negara lain. Sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dan juga sebagai negara yang memiliki suku bangsa terbesar di dunia.⁶ Oleh karena itu, konsep apakah yang tepat untuk digunakan dalam merawat Indonesia yang penuh dengan perbedaan.⁷ Terdapat dua pilihan untuk meneropong Indonesia, yakni antara pluralisme dan multikulturalisme.

Pluralisme berasal dari kata plural atau jamak (lebih dari satu). Artinya, dalam konteks budaya, kata plural berarti mengakui keberadaan identitas budaya lain di antara kebudayaan yang ada. Begitu juga dalam konteks agama, sejatinya kata plural merupakan sesuatu yang sunnatullah dalam penciptaan. Dan, dalam konteks pemerintahan, pluralisme merupakan jenis pemerintahan yang menganut paham bahwa kekuasaan di suatu negara harus dibagi ke dalam beberapa lembaga untuk membatasi satu kewenangan terhadap kewenangan lain (1994: 277).⁸

⁶ Terdapat 3000 suku bangsa (Liliweri, 2009:6).

⁷ Perbedaan yang dimaksudkan adalah perbedaan suku, agama dan ras yang terdapat di Indonesia.

⁸ Lihat Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13 tahun 1994, halaman 277.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pluralisme adalah hal yang mengatakan jamak atau tidak satu.⁹ Konotasi dari pemaknaan kata pluralisme mengarah pada suatu keberagaman dan kemajemukan. Sejatinya, pluralisme adalah bentuk dari paham yang tidak mengakui ketunggalan atau satu, tetapi lebih melihat pada keberagaman (atau jamak). Indonesia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya plural. Gambaran ini tercermin dari namanya sendiri. Identitas ini yang kemudian dicirikan oleh Furnival bahwa masyarakat yang plural yaitu masyarakat yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua elemen atau orde sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik.¹⁰ Indonesia, menurut Hefner (2004: 4) merupakan negara yang pluralisme kulturalnya sangat mencolok dan hanya terdapat pada beberapa wilayah lain di dunia. Hal tersebut tidak terlepas dari representasi semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam lambang negara Indonesia yakni Pancasila.

Konsep pluralisme sering diinterpretasikan dengan konsep multikulturalisme. Setidaknya, kedua istilah itu yang sering kita dengar tetapi kurang diperdebatkan

perbedaannya. Jika pluralisme mengacu pada 'lebih dari satu atau jamak' dari konsepsi masyarakat. Maka multikulturalisme juga diartikan demikian. Berikut ini adalah pandangan mengenai konsep multikulturalisme. Secara singkat asal-usul multikulturalisme itu marak di Kanada pada tahun 1960, lalu berlanjut di AS, Inggris dan Australia selama kurun waktu tahun 70-an. Konsep multikulturalisme sering disebut etno-kritisisme.¹¹ Multikulturalisme merupakan sebuah konsep yang merujuk pada paham akan keragaman dan pembauran budaya (Abdulrahman, 2013:173). Azra dalam orasi budaya tentang 'Merawat Kemajemukan', menjelaskan multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang mengakui eksistensi kultural yang ada, terlepas dari besar atau kecilnya; pandangan inilah yang kemudian disebut sebagai *Politics of recognition*.¹²

Dengan pengertian yang beragam dan kecenderungan perkembangan konsep dan praktik multikulturalisme, maka Parekh (2008) membedakan lima macam multikulturalisme. *Pertama*, "multikulturalisme isolasionis" yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom

⁹ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cetakan pertama tahun 1988 halaman 691, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. Balai Pustaka.

¹⁰ Periksa Yudi Latif, 2007. Dalam *Dialektika Is-lam*. Cetakan pertama. Jogjakarta. Jalasutra.

¹¹ Periksa Irwan Abdullah, dalam *Multikulturalisme*. Bahan kuliah Sekolah Pasca Sarjana UGM, tahun 2011.

¹² Periksa Azyumardi Azra, 2007. Dalam *Orasi Ilmiah "Merajut Kemajemukan Merawat Indonesia"*. Cetakan pertama. Yogyakarta. kanisius

dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. *Kedua*, “multikulturalisme akomodatif”, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. *Ketiga*, “multikulturalisme otomatis”, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. *Keempat*, “multikulturalisme kritikal” atau “interaktif”, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu *concern* dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih menuntut penciptaan kultural kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspekti-perspektif distingtif mereka. dan yang *kelima*, “multikulturalisme kosmopolitan”, yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan *committed* kepada budaya tertentu dan, sebaliknya, secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Tentu saja dalam pembagian kelima bentuk multikulturalisme itu tidak “kedap air”, sebaliknya bisa tumpang tindih dalam segi-segi tertentu. Dari kelima konsep

multikulturalisme dari Parekh inilah yang nantinya menjadi nilai tawar bagi bangsa Indonesia untuk membangun negara yang majemuk sesuai dengan harapan para *finding fathers* yang tertuan dalam semboyan bhineka tunggal ika.

Perlu diketahui bahwa dalam mengamati masyarakat Indonesia yang multietnis, maka konsep kemajemukan menjadi sandaran utama. Konsep kemajemukan sebenarnya terangkum dalam istilah multikulturalisme dan pluralisme yang sudah dijelaskan. Indikator ini disebabkan kedua istilah tersebut memiliki banyak kesamaan dalam hal pendefinisian, dan selalu diartikan sebagai kemajemukan. Kesamaan ini terlihat dari rumusan makna yang menggambarkan kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat berbagai bentuk kebudayaan lain. Artinya, kedua konsep tersebut sama-sama membicarakan tentang keanekaragaman atau kemajemukan dalam suatu tatanan sosial kemasyarakatan.

Perbedaan mendasar dari kedua konsep ini, di mana, pluralisme dalam suatu masyarakat lebih menekankan pada unsur kesetaraan namun tidak menekankan pada aspek toleransi, sedangkan multikulturalisme penekanannya pada aspek sikap toleran dalam kesetaraan. Setidaknya perbedaan ini merupakan pene-gasan dari kelima konsep multikulturalisme dari Parekh di atas.

Indonesia hari ini dapat dikata masih membangun ke-identitasnya.

Penutup

Memperbincangkan Indonesia saat ini penuh dengan simbol-simbol identitas yang melekat pada kelompok-kelompok tertentu, namun masih tetap satu. Kompleksitas bangsa Indonesia yang ditampilkan media massa (tv dan surat kabar), turut membuat kita pesimis dan apatis terhadap bangsa ini. Meskipun para pendiri bangsa telah meretaskan jalan untuk membangun suatu kebersamaan melalui semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda namun tetap satu), akan tetapi “dipersimpangan jalan” masih ada juga yang ingin mengusik kebinekaan itu. Berbagai macam konflik sosial, budaya maupun politik kerap terjadi pada masyarakat Indonesia. Aksi-aksi anarkisme bak jamur di musim penghujan. Kasus-kasus kekerasan yang ditampilkan media masa (tv dan surat kabar), bagaikan iklan dalam setiap episode film.

Sebagai negara yang memiliki ciri khas kemajemukan, hal ini menjadi sebuah ironi di mana simbol kebinekaan seolah hanya menjadi “label” yang terpajang begitu saja. Banyak pakar berpendapat bahwa “wajah” Indonesia hari ini sudah terkontaminasi oleh sejumlah konflik sosial –budaya, politik – yang didasari oleh kepentingan vertikal penguasa. Dari titik inilah, selayaknya kita mem-

pertanyakan kembali Identitas keindonesian kita.

Daftar Pustaka

- Abdulrahman, Jusuf. 2013. *Kapita Selekta; Sejarah Bahasa dan Budaya Moloku Kie Raha*. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Kanisius
- Abdullah, Irwan. 2011. Bahan Kuliah “Multikulturalisme”. Sekolah Pascasarjana, UGM Yogyakarta.
- Azra, Azyumardi. 2007. *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*. Cetakan pertama. Yogyakarta. Kanisius
- Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 3 tahun 1989. Jakarta. Cipta Andi Pustaka
- Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13 tahun 1994. Jakarta. Cipta Andi Pustaka
- Habermas, Jurgen. 1974. *Theory and Practice*, London Heinemann
- Harian Tempo tanggal 29 Januari 2017
- Hidayanti, Mega. *Jurang di antara Kita*. cetakan pertama. Yogyakarta. Kanisius
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI), 1988. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka.

Latif, Yudi. 2007. *Dialektika Islam*.
Cetakan pertama. Yogyakarta.
Jalasutra

Liliweri, Alo. 2009. *Prasangka dan
Konflik*. Cetakan kedua.
Yogyakarta. LkiS

Parekh, Bhikhu. 2008. *Rethinking
Multiculturalism*. Cetakan
pertama. Yogyakarta. Kanisius